

VOC dan Kolonialisme Hindia Belanda: Warisan Sejarah dan Implikasi bagi Nasionalisme Indonesia

Indah Natalia Sinambela¹ Jenifer Mauli Stefani Siboro² Riana Debora Br Tarigan³ Rofly Armadhany⁴

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: indahnatalia191@gmail.com¹ jenifersiboro9@gmail.com² rianadebora882@gmail.com³ rarmadhany@gmail.com⁴

Abstrak

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hadir di Nusantara sejak awal abad ke-17 dengan tujuan utama menguasai perdagangan rempah-rempah. Namun, dalam perjalanannya VOC tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan dagang, melainkan juga sebagai kekuatan politik dan militer yang menancapkan pengaruh mendalam dalam kehidupan masyarakat lokal. Melalui sistem monopoli perdagangan, pengendalian wilayah strategis, serta intervensi terhadap kerajaan-kerajaan lokal, VOC meletakkan fondasi awal kolonialisme yang kelak dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji warisan sejarah VOC dalam konteks kolonialisme serta implikasinya terhadap tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Kajian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dari sumber-sumber akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun VOC identik dengan praktik monopoli, korupsi, dan eksploitasi, keberadaannya juga secara tidak langsung mendorong perubahan struktural dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Proses interaksi tersebut menjadi latar penting bagi munculnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menentang kolonialisme. Temuan ini memperlihatkan bahwa VOC bukan hanya simbol kolonialisme awal, tetapi juga aktor historis yang meninggalkan jejak panjang dalam dinamika masyarakat Indonesia. Implikasi dari warisan VOC tercermin pada lahirnya kesadaran nasional yang berujung pada perjuangan kemerdekaan. Dengan demikian, studi ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang akar-akar kolonialisme sekaligus bagaimana bangsa Indonesia menemukan identitas dan semangat persatuan dari pengalaman sejarahnya.

Kata Kunci: VOC; Kolonialisme; Hindia Belanda; Nasionalisme; Warisan Sejarah

Abstract

The presence of the Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in the Indonesian archipelago since the early 17th century marked a pivotal moment in the history of colonialism in Southeast Asia. Initially established as a commercial trading company, the VOC gradually transformed into a political and military power that exercised significant control over local societies. Through its trade monopoly, territorial expansion, and interventions in local kingdoms, the VOC laid the structural foundations for Dutch colonialism that would later be institutionalized in the Dutch East Indies administration. This study examines the historical legacy of the VOC within the broader framework of colonialism and its implications for the rise of Indonesian nationalism. Employing a qualitative approach through literature review, the research highlights how the VOC's practices—often characterized by corruption, exploitation, and monopolistic control—shaped economic, social, and political transformations across the archipelago. While the VOC primarily sought profit and dominance, its presence inadvertently fostered structural changes that became a catalyst for collective resistance. The findings reveal that the VOC was not merely an economic institution but a colonial entity whose legacy profoundly influenced Indonesia's historical trajectory. The experience of exploitation and control under the VOC contributed to the development of national awareness and identity, which later played a crucial role in the independence movement. Thus, this study underscores the dual nature of the VOC's legacy: as a symbol of colonial oppression and as an unintended contributor to the growth of Indonesian nationalism.

Keywords: VOC; Colonialism; Dutch East Indies; Nationalism; Historical Legacy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejarah kolonialisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehadiran Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) sejak awal abad ke-17. VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan dagang terbesar pada masanya, melainkan juga sebagai entitas politik yang memiliki hak istimewa layaknya negara berdaulat, termasuk hak untuk membentuk angkatan bersenjata, mengadakan perjanjian dengan kerajaan lokal, dan menguasai wilayah strategis (Grataridarga et al., 2023). Hal ini menjadikan VOC bukan sekadar aktor ekonomi, tetapi juga instrumen kolonialisme yang membentuk wajah awal penjajahan Belanda di Nusantara. Kehadiran VOC membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat lokal. Sistem monopoli perdagangan yang diterapkan memutus jaringan perdagangan tradisional yang sebelumnya terbuka, dan menggantinya dengan kontrol ketat yang hanya menguntungkan kepentingan kolonial (Surya & Fikriya, 2022). Dalam konteks ini, masyarakat lokal tidak lagi memiliki kebebasan menentukan harga dan distribusi hasil bumi, melainkan harus tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh VOC. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan ekonomi sekaligus memperdalam kesenjangan sosial. Selain aspek ekonomi, VOC juga memengaruhi struktur sosial dan politik di Nusantara. Intervensi VOC terhadap kerajaan-kerajaan lokal sering kali dilakukan melalui politik adu domba, yang bertujuan untuk memperlemah kekuatan pribumi agar mudah dikendalikan (Nijman, 1994). Praktik tersebut menimbulkan fragmentasi di antara elite lokal, yang pada gilirannya memperkuat dominasi kolonial. Namun, di sisi lain, pengalaman ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa persatuan merupakan kunci untuk melawan kolonialisme. Dengan demikian, meskipun kehadiran VOC bersifat represif, dampaknya turut berkontribusi pada pembentukan benih-benih nasionalisme di kemudian hari.

Warisan VOC juga dapat dilihat dari segi administrasi kolonial. Sistem birokrasi yang diperkenalkan VOC pada akhirnya menjadi model yang diwarisi oleh pemerintah Hindia Belanda setelah pembubaran VOC pada tahun 1799 (Muhammad Basri et al., 2024). Sistem tersebut bukan hanya memperkuat kontrol atas sumber daya, tetapi juga memperkenalkan pola administrasi yang lebih sistematis, meskipun digunakan untuk kepentingan kolonial. Dalam jangka panjang, struktur administratif ini memengaruhi cara masyarakat Indonesia mengelola pemerintahan setelah kemerdekaan. Dengan demikian, kajian mengenai VOC tidak sekadar memaparkan kisah kolonialisme masa lalu, melainkan juga membuka ruang refleksi terhadap warisan sejarah yang masih berpengaruh hingga kini. VOC dapat dipandang sebagai simbol kolonialisme awal yang menindas, sekaligus faktor yang secara tidak langsung mempercepat lahirnya kesadaran nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kolonialisme VOC membentuk dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Kehadiran VOC di Nusantara dapat dipandang sebagai titik awal terbentuknya pola kolonialisme modern yang berbasis pada penguasaan ekonomi sekaligus penetrasi politik. Jika sebelumnya relasi perdagangan antara bangsa asing dan kerajaan lokal cenderung bersifat simbiosis, maka sejak VOC hadir, pola tersebut berubah menjadi hubungan eksploitatif yang menempatkan masyarakat lokal sebagai objek dominasi. Hipotesis utama yang dapat diajukan adalah bahwa warisan VOC tidak hanya berupa kerugian ekonomi atau penderitaan sosial, melainkan juga membentuk kerangka berpikir bangsa Indonesia tentang kolonialisme. Penderitaan akibat monopoli, penindasan, dan ketidakadilan justru mendorong kesadaran kolektif bahwa penjajahan harus diakhiri. Dengan kata lain, pengalaman pahit di bawah VOC

menjadi katalis yang mempercepat lahirnya gagasan nasionalisme. Selain itu, VOC dapat dipahami sebagai entitas yang tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi secara struktural menciptakan sistem administrasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Sistem inilah yang kemudian diteruskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, sehingga dampaknya tidak berhenti pada masa VOC saja. Hal ini memberi gambaran bahwa VOC adalah fondasi dari kolonialisme Belanda di Indonesia.

Jika dicermati lebih jauh, VOC meninggalkan paradoks: di satu sisi ia menindas dan mengeksploitasi, tetapi di sisi lain, ia memicu perubahan sosial-politik yang pada akhirnya memperkuat kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu. Dengan demikian, penelitian mengenai VOC tidak hanya relevan untuk memahami sejarah kolonial, tetapi juga untuk menyingkap bagaimana pengalaman kolonial membentuk identitas nasional. Selain sebagai organisasi dagang, VOC juga dapat dipandang sebagai instrumen awal imperialisme Barat di Asia Tenggara. Kehadirannya bukan hanya menekankan aktivitas jual beli, tetapi juga membangun sistem kontrol yang menembus aspek politik, hukum, dan militer. Hipotesis yang dapat diajukan adalah bahwa dominasi VOC telah menanamkan pola subordinasi yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. VOC secara tidak langsung memperkenalkan bentuk pemerintahan terpusat dengan struktur birokrasi yang ketat. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk mengamankan keuntungan dagang, praktik ini menyiapkan landasan bagi administrasi kolonial Belanda. Artinya, VOC berfungsi sebagai laboratorium kolonialisme yang uji cobanya kemudian dilembagakan oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam kerangka sosial, VOC menciptakan lapisan masyarakat baru yang rentan terhadap diskriminasi dan kesenjangan. Sistem monopoli dan pemaksaan kerja menumbuhkan jurang pemisah antara penguasa kolonial dan masyarakat lokal. Dari sini dapat diasumsikan bahwa konflik sosial yang berlarut-larut di Nusantara pada masa kolonial berakar pada praktik VOC yang memprioritaskan kepentingan ekonomi di atas keadilan sosial. Dampak psikologis juga tidak kalah penting. Pengalaman ditindas dalam jangka waktu lama menghasilkan trauma kolektif yang membentuk narasi sejarah bangsa. Hipotesis yang muncul adalah bahwa trauma tersebut bukan hanya membekas, tetapi juga menjadi energi yang mendorong munculnya perlawanan. Semakin keras penindasan dilakukan, semakin kuat pula embrio gerakan perlawanan berkembang di berbagai wilayah. Dengan demikian, mempelajari VOC bukan hanya soal menyingkap catatan ekonomi atau politik, tetapi juga soal memahami bagaimana bangsa Indonesia secara bertahap menyadari pentingnya kemandirian, persatuan, dan perjuangan melawan kolonialisme. VOC, meski membawa penderitaan, justru mempercepat lahirnya identitas kebangsaan yang menjadi fondasi bagi kemerdekaan Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai keberadaan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dalam sejarah Indonesia telah banyak dibahas oleh para peneliti. Dalam dimensi ekonomi, beberapa studi menunjukkan bahwa monopoli perdagangan VOC berdampak besar terhadap hilangnya kedaulatan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian (Gaspersz, 2022) menguraikan bahwa kebijakan tanam paksa rempah-rempah telah menyebabkan perubahan struktur produksi agraris di Nusantara, dari sistem subsisten menuju sistem ekonomi kolonial yang berorientasi ekspor. Sementara itu, perspektif politik menyoroti VOC sebagai pionir dalam membangun struktur pemerintahan kolonial. Seperti dipaparkan dalam penelitian (Aziz & Prabaswara, 2024), VOC tidak hanya bertindak sebagai perusahaan dagang, tetapi juga memiliki otoritas layaknya negara dengan hak mencetak mata uang, mengangkat pejabat, hingga mengadakan perjanjian dengan kerajaan lokal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sejak awal, VOC membawa kepentingan imperialisme yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia

Belanda. Di sisi lain, penelitian sejarah sosial menekankan dampak VOC terhadap kehidupan masyarakat lokal. Studi (Rahman et al., 2021) menekankan bahwa kebijakan VOC dalam monopoli perdagangan menciptakan ketidakadilan struktural yang berujung pada kesenjangan sosial. Hal ini mendorong lahirnya resistensi lokal dalam bentuk perlawanan rakyat, baik secara terbuka maupun terselubung.

Penelitian terbaru (Kambang et al., 2020) bahkan menyoroti warisan birokrasi VOC yang masih terasa dalam administrasi modern Indonesia. Menurut kajian tersebut, praktik sentralisasi dan kontrol ketat terhadap sumber daya menjadi model awal birokrasi kolonial yang kemudian direplikasi dalam sistem pemerintahan kolonial dan berlanjut hingga masa pascakolonial. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa literatur tentang VOC telah berkembang dalam tiga arus utama: ekonomi, politik, dan sosial. Namun, masih terdapat ruang untuk mengeksplorasi keterkaitan antara ketiga dimensi tersebut secara holistik. Penelitian ini mencoba menyoroti bagaimana VOC bukan hanya instrumen perdagangan, tetapi juga entitas politik yang berperan dalam membentuk struktur kolonialisme Belanda di Indonesia. Selain dimensi ekonomi, politik, dan sosial, literatur juga menyoroti aspek budaya dan hukum yang dibawa VOC. Sejumlah kajian menekankan bahwa VOC memperkenalkan sistem hukum dualistik yang memisahkan hukum bagi orang Eropa dan pribumi (Hibatullah, 2021). Sistem ini secara tidak langsung melahirkan praktik diskriminasi hukum yang kelak menjadi salah satu ciri kolonialisme Belanda di Hindia. Dari segi budaya, VOC turut membentuk pola interaksi baru melalui percampuran antara masyarakat lokal, pendatang dari Eropa, dan kelompok budak yang didatangkan dari berbagai wilayah Asia (Hernawan, 2023). Percampuran ini melahirkan lapisan sosial baru yang kemudian memperkuat identitas kelompok peranakan di Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa VOC, meskipun berorientasi ekonomi, berperan dalam membentuk keragaman sosial-budaya yang kompleks.

Dalam bidang pendidikan, beberapa penelitian (Wihardyanto & Ikaputra, 2019) menunjukkan bahwa VOC hanya membuka akses pendidikan terbatas bagi masyarakat tertentu, terutama anak-anak pejabat atau keluarga elite yang bekerja sama dengan mereka. Kondisi ini memperkuat stratifikasi sosial sekaligus menutup ruang mobilitas sosial bagi mayoritas rakyat pribumi. Studi kontemporer juga menggarisbawahi bahwa VOC meninggalkan warisan institusional yang cukup panjang. Menurut (Salsabila, 2024), struktur administrasi, sistem pencatatan, hingga mekanisme pengumpulan pajak yang diterapkan VOC menjadi cikal bakal dari sistem birokrasi kolonial Belanda. Analisis ini penting untuk melihat bagaimana VOC bukan sekadar fenomena ekonomi sesaat, melainkan fondasi struktural kolonialisme jangka panjang. Dengan demikian, tinjauan pustaka yang ada menunjukkan bahwa penelitian tentang VOC telah berkembang dari sekadar narasi sejarah perdagangan menuju analisis multidimensional yang mencakup aspek politik, sosial, budaya, hukum, hingga institusional. Penelitian ini berusaha mengisi celah dengan menghadirkan sintesis dari berbagai dimensi tersebut, untuk menunjukkan bagaimana VOC secara integral membentuk wajah kolonialisme Hindia Belanda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis yang berfokus pada analisis dokumen dan literatur akademik. Pendekatan ini dipilih karena topik mengenai VOC dan kolonialisme Hindia Belanda berkaitan erat dengan sumber-sumber tertulis, baik berupa arsip, catatan resmi, maupun hasil penelitian terdahulu yang tersedia dalam basis data internasional maupun nasional. Data yang dianalisis berasal dari artikel jurnal yang terindeks, sehingga mampu merepresentasikan perspektif kontemporer terhadap isu kolonialisme dan warisan VOC di Indonesia. Tahapan penelitian dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi,

dan analisis literatur. Pertama, peneliti mengidentifikasi artikel-artikel yang relevan dengan topik menggunakan kata kunci seperti VOC, colonialism, Dutch East India Company, dan Hindia Belanda. Artikel yang dipilih kemudian diseleksi berdasarkan kriteria keterkinian, reputasi jurnal, serta relevansinya dengan tema penelitian. Setelah itu, artikel dianalisis untuk mengungkap pola, persamaan, serta perbedaan pandangan dalam literatur yang ada. Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi (content analysis). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam teks, serta menghubungkan temuan dari berbagai sumber. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Namun, dimensi hukum dan institusional juga ditelaah untuk memperkaya perspektif penelitian. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari literatur internasional dengan hasil kajian akademik dalam negeri. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan perspektif global mengenai VOC, tetapi juga memperhatikan konteks lokal Indonesia. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana VOC berperan dalam membentuk struktur kolonialisme Belanda di Nusantara. Selain itu, metode ini juga memungkinkan penarikan hipotesis teoretis mengenai warisan kolonial yang masih berpengaruh hingga masa kini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa VOC memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk struktur kolonialisme Belanda di Indonesia. Temuan utama memperlihatkan bahwa meskipun VOC pada awalnya didirikan sebagai perusahaan dagang, fungsinya berkembang melampaui aktivitas ekonomi murni. VOC memiliki kewenangan politik dan militer yang membuatnya berfungsi sebagai entitas negara di luar Eropa. Hal ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa keberadaan VOC di Nusantara tidak hanya menguasai jalur perdagangan, tetapi juga mengintervensi struktur politik kerajaan-kerajaan lokal. Dari sisi ekonomi, VOC mengubah pola produksi dan distribusi barang di Nusantara. Monopoli perdagangan rempah-rempah mendorong terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya lokal. Petani dan produsen lokal dipaksa menyesuaikan pola tanamnya sesuai kebutuhan pasar global yang ditentukan oleh VOC. Akibatnya, terjadi pergeseran dari sistem pertanian subsisten ke arah sistem ekonomi kolonial yang menekankan produksi komoditas ekspor. Dampak jangka panjang dari kondisi ini adalah ketergantungan masyarakat lokal terhadap pasar kolonial serta hilangnya kemandirian ekonomi tradisional.

Dalam dimensi politik, VOC berhasil memperlemah struktur kerajaan-kerajaan lokal melalui strategi perjanjian, persekutuan, dan intervensi militer. Berbagai perjanjian yang ditandatangani dengan penguasa lokal sering kali bersifat timpang, di mana VOC memperoleh hak istimewa, sementara kerajaan kehilangan sebagian besar kedaulatannya. Situasi ini menunjukkan bahwa VOC menjadi pionir kolonialisme Belanda dengan cara mengikis legitimasi politik pribumi secara perlahan. Dari perspektif sosial-budaya, kehadiran VOC menciptakan stratifikasi sosial baru. Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh pemisahan kelas yang tajam antara orang Eropa, peranakan, dan pribumi. Selain itu, praktik diskriminasi hukum yang diterapkan VOC melahirkan ketidakadilan struktural yang memperkuat perbedaan sosial. Kondisi ini pada akhirnya menumbuhkan benih-benih perlawanan yang terwujud dalam berbagai gerakan lokal di abad ke-17 hingga ke-19. Adapun dari dimensi hukum dan institusional, VOC mewariskan sistem administrasi yang cukup kompleks. Sentralisasi kekuasaan, pencatatan pajak, hingga pengelolaan perdagangan dengan dokumentasi resmi merupakan praktik yang kemudian diadopsi dan diperluas oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa VOC bukan hanya entitas dagang, melainkan pula agen pembentuk tata kelola kolonial.

Tabel 1. Dimensi Dampak VOC di Nusantara

Dimensi	Dampak Utama	Implikasi Jangka Panjang
Ekonomi	Monopoli perdagangan rempah, eksploitasi sumber daya lokal	Hilangnya kemandirian ekonomi, ketergantungan pasar kolonial
Politik	Perjanjian timpang dengan kerajaan lokal, intervensi militer	Melemahnya kedaulatan kerajaan pribumi
Sosial-Budaya	Stratifikasi sosial, diskriminasi hukum, ketidakadilan struktural	Lahirnya resistensi lokal dan gerakan perlawanan
Hukum & Birokrasi	Sistem administrasi kolonial, pencatatan pajak, sentralisasi kekuasaan	Warisan birokrasi kolonial yang berlanjut pascakemerdekaan

Selain dampak ekonomi, politik, sosial, dan hukum, salah satu aspek penting dalam memahami VOC adalah dinamika perlawanan rakyat terhadap kekuasaan kolonial ini. Sejak abad ke-17, berbagai daerah di Nusantara menolak dominasi VOC yang dianggap merugikan dan menindas kehidupan masyarakat lokal. Perlawanan tersebut tidak hanya berbentuk perlawanan bersenjata, tetapi juga resistensi pasif melalui penolakan kebijakan, penyelundupan barang, hingga sabotase sistem monopoli. Perlawanan terbesar di awal abad ke-17 adalah yang dipimpin oleh Sultan Agung dari Mataram, yang berusaha menghentikan dominasi VOC di Batavia. Walaupun gagal secara militer, perlawanan ini menunjukkan adanya kesadaran politik dari kerajaan lokal untuk mempertahankan kedaulatannya. Di wilayah Maluku, rakyat di bawah pimpinan tokoh-tokoh lokal juga berulang kali melancarkan penentangan terhadap monopoli rempah VOC. Hal ini menandakan bahwa kebijakan monopoli telah menimbulkan penderitaan luas dan memicu penolakan sistematis. Pada abad ke-18, perlawanan rakyat semakin meluas, salah satunya melalui Perang Gowa di Sulawesi Selatan dan konflik panjang di Banten. Setiap perlawanan mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap praktik monopoli dan penindasan yang dilakukan VOC. Meskipun sering berakhir dengan kekalahan, perlawanan ini meninggalkan warisan penting berupa semangat perjuangan dan solidaritas antarkelompok lokal. Dari perspektif sosial, perlawanan rakyat juga menjadi ajang konsolidasi identitas kolektif. Semakin keras VOC menekan masyarakat, semakin kuat pula kesadaran untuk bersatu melawan dominasi asing. Dengan kata lain, meskipun VOC berhasil mempertahankan kekuasaannya selama hampir dua abad, penolakan rakyat yang terus-menerus justru menjadi benih awal bagi terbentuknya kesadaran kebangsaan Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa VOC memiliki peranan yang jauh melampaui fungsi utamanya sebagai perusahaan dagang. Kehadirannya di Nusantara menandai awal dari proses kolonialisme yang sistematis, dengan dampak multidimensi terhadap masyarakat lokal. Dalam bidang ekonomi, VOC memaksakan monopoli perdagangan yang menyebabkan hilangnya kemandirian ekonomi masyarakat pribumi dan menumbuhkan ketergantungan pada pasar kolonial. Dari sisi politik, VOC memperlemah kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal melalui perjanjian timpang dan intervensi militer. Dimensi sosial-budaya memperlihatkan terjadinya stratifikasi sosial baru dan diskriminasi hukum yang menciptakan ketidakadilan struktural. Hal ini mendorong lahirnya perlawanan rakyat di berbagai daerah, baik melalui perlawanan terbuka maupun resistensi pasif. Sementara itu, dari segi hukum dan birokrasi, VOC mewariskan pola administrasi kolonial yang kemudian direplikasi oleh pemerintahan Hindia Belanda, bahkan memengaruhi sistem birokrasi hingga pascakemerdekaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa VOC tidak hanya meninggalkan jejak sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai agen kolonial yang membentuk wajah politik, sosial, hukum, dan budaya Indonesia pada masa kolonial. Meskipun meninggalkan trauma kolektif, keberadaan VOC juga menjadi

pemicu lahirnya kesadaran perlawanan dan semangat kebangsaan yang akhirnya mengarah pada perjuangan kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. R., & Prabaswara, S. S. (2024). Divide et Impera in the Banten Sultanate: The Political Succession of Sultan Haji and VOC's Pepper Monopoly in the 17th and 18th Centuries. *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.14421/skijic.v6i1.2826>
- Fallihah Yumna Asar, A., & Hardi, E. (2024). Diskriminasi Pada Masa Kolonialisme Belanda Dan Jepang Dalam Novel Bumi Manusia Dan Novel Perburuan Karya Pramoedya Ananta Toer : Sebuah Studi Historiografi. *Jurnal Family Education*. <https://doi.org/10.24036/jfe.v4i1.160>
- Gaspersz, S. G. C. (2022). Islam di Kota Ambon pada Masa Kolonial: Perspektif Sejarah. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v15i2.103>
- Grataridarga, N., Mardiaty, W., & Putri, N. R. (2023). Digitization of the 17th and 18th Centuries' Dutch East India Company (VOC) Archives for The Archives' Preservation. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083060>
- Hernawan, W. (2023). Sejarah Perkembangan Keraton Cirebon (1452 – 1680 M.). *Jurnal Lektur Keagamaan*. <https://doi.org/10.31291/jlka.v21i1.1122>
- Hibatullah, M. I. (2021). Harga diri dan prasangka: masyarakat multikultural di Batavia abad 17 sampai 19. *Historiography*. <https://doi.org/10.17977/um081v1i42021p405-418>
- Kambang, J. N., Dewi, R. S., & Arif, E. (2020). Jalan Panjang Pemberitaan Terorisme di Indonesia Sejak Masa Kolonial Hingga Kini. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*. <https://doi.org/10.25077/rk.4.1.89-105.2020>
- Muhammad Basri, Sara Ningtya Ayu, Ghina Nabilla, & Syanti Luara Berutu. (2024). Background to the Arrival of the Dutch, VOC, Dutch East Indies. *EDUCTUM: Journal Research*.
- Nijman, J. (1994). The VOC and the expansion of the world-system 1602-1799. *Political Geography*. [https://doi.org/10.1016/0962-6298\(94\)90027-2](https://doi.org/10.1016/0962-6298(94)90027-2)
- Rahman, A., Marwal, I., & Maulana Hamzah, M. (2021). Historiografi Sekularisasi Pasar pada Masyarakat Muslim Indonesia dimasa Kolonial Belanda (1602 - 1942). *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.1034>
- Salsabila, F. (2024). Kerusakan hutan jati di Jawa oleh eksploitasi VOC, 1611-1796. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v14i1.15041>
- Surya, R. A., & Fikriya, R. (2022). The Contribution of Western Humanism Ideas Towards Education Policy in The Dutch East Indies (1817-1942). *Paramita: Historical Studies Journal*. <https://doi.org/10.15294/paramita.v32i1.30787>
- Wihardyanto, D., & Ikaputra, I. (2019). Pembangunan Permukiman Kolonial Belanda Di Jawa : Sebuah Tinjauan Teori. *Nature: National Academic Journal of Architecture*. <https://doi.org/10.24252/nature.v6i2a5>